

Peran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dahliah ✉

Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan umkm di kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui peran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi dalam pemberdayaan umkm di kabupaten Bulukumba. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba yaitu sejumlah 7.931 jenis UMKM, berdasarkan data dari Dinas koperasi, UMKM, perdagangan, pertambangan, dan energi kabupaten Bulukumba. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Terciptanya iklim yang kondusif, 2. Meningkatkan Pembiayaan dan permodalan bagi UMKM, 3. Sasaran Peningkatan kerjasama bagi semua pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah. Kesimpulan dari pengamatan ini, disarankan agar pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bulukumba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat merangkul para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bulukumba untuk bersama-sama memajukan usaha yang bermodal kecil ini.

Kata Kunci: *pemberdayaan UMKM; dinas koperasi, UMKM, perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan energi.*

Copyright (c) 2022 Dahliah

✉ Corresponding author :

Email Address : dahliah.dahliah@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, memberikan angin segar bagi para wirausaha yang masih memulai usahanya dengan modal yang kecil. Dengan dukungan dari pemerintah, bukan tidak mungkin sektor ekonomi Indonesia akan semakin lebih baik. Pemerintah optimis sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) akan menjadi tiang ekonomi rakyat paling kuat di Indonesia. Bahkan pemerintah yakin pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran serta, angka kemiskinan di Indonesia (Firmansyah, 2014).

Pengertian UMKM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 1 yang berbunyi: 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan (Abidin, 2018). Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala yang sangat kecil dan mungkin hanya di pandang sebelah mata oleh pemerintah (Darwanto, 2017).

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah yang berada di Daerah, dan mendapat dukungan dari masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Ramadhanti et al., 2022).

Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan PDB, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan.

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi, perlu untuk dilakukan. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UMKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Hampir semua usaha besar berawal dari UMKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UMKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang (Wardani, 2013).

Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UMKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pelaku UMKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah (Pratama, 2016).

Kementerian Koperasi dan UKM dengan kebijakannya yang baru-baru ini, semoga sektor UKM dapat berkembang lebih pesat di Indonesia, karena merupakan tonggak dasar perekonomian Indonesia, sehingga tidak lagi bergantung pada produk-produk luar negeri, dengan memberikan pinjaman modal berupa suatu program yang dapat memudahkan masyarakat kecil. Dalam rangka memperluas sumber pendanaan, tersedia pula program kredit usaha rakyat dan pinjaman dalam bentuk surat utang pemerintah. Terdapat dua lembaga penjaminan kredit, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Surat utang pemerintah dapat digunakan untuk kredit usaha mikro kecil. Kredit ini digunakan untuk biaya usaha dengan modal Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Bunga untuk pinjaman ini dibatasi tidak lebih dari 7 persen (<http://www.depkop.go.id/>).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 16 yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi.

Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota sangat berperan penting untuk memajukan UKM di tiap-tiap wilayahnya, di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten dan kota. Dimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah dapat mengelola rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba, merupakan suatu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah yang terletak paling selatan pulau Sulawesi ini, harus lebih meningkatkan kinerja para aparaturinya, untuk menekan angka pengangguran yang berada di Kabupaten Bulukumba, karena potensi alam yang dimiliki Kabupaten Bulukumba sangat melimpah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan juga maupun sektor pariwisata, maka sangat ironis jika kabupaten yang dijuluki butta panrita lopi ini mempunyai angka pengangguran yang lebih tinggi dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dengan memberdayakan UMKM di bawah peran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, semoga Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan PAD melalui sektor UMKM yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba yang terletak kurang lebih 150 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini, terasa sangat jauh bagi pelaku UKM yang mempunyai modal yang kecil, karena keterbatasannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelaku UKM yang berada di Kabupaten Bulukumba, dimana dengan jarak yang cukup jauh tersebut, dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba, khususnya melalui sektor pemasaran UKM, terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Modal yang merupakan faktor utama diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha (Syafii et al., 2020). Kurangnya modal UKM, di Kabupaten Bulukumba oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan

teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi oleh sebagian masyarakat kecil yang bergerak di sektor UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba.

Kualitas sumber daya manusia yang masih sangat kurang juga merupakan faktor penghambat laju dari sektor UMKM. Tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia rata-rata kualitas sumber daya manusianya masih jauh di atas rata-rata dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota tersebut, tak terkecuali di Kabupaten Bulukumba, karena sektor pendidikan merupakan pendongkrak suatu kualitas sumber daya manusia untuk memajukan suatu produk, khususnya produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku yang bergerak dibidang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya yang berada di Kabupaten Bulukumba. Kuncoro (2007) mengemukakan bahwa: "Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun, disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan."

Pengembangan usaha kecil di Kabupaten Bulukumba tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak sekali hambatan yang perlu dihadapi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuncoro. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang Kabupaten Bulukumba miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

Hal tersebut sangat di butuhkan untuk membantu proses jual beli barang dan jasa, dan termasuk hal yang sangat penting juga apakah pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba mampu bersaing dengan produk dari dalam negeri dan bahkan mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Pemasaran merupakan hasil akhir dari suatu produk-produk yang dihasilkan oleh sector UMKM, Karena pemasaran suatu hal yang penting maka untuk sebuah kelangsungan suatu produk, di Kabupaten Bulukumba sendiri pemasaran sangatlah kurang, Karena masih kurang mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang lebih sudah terlebih dahulu punya nama dan sudah di kenal oleh sebagian dan bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Sentra UMKM dapat dibagi juga menjadi beberapa sektor, dimana setiap sektor mempunyai peran penting dalam memajukan umkm di kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Data Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Bulukumba

No	Sektor Ekonomi	Skala Usaha			Umkm
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	2	3	4	5	(3+4+5)
1.	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1.621	40	24	1685

2.	Pertambangan dan Penggilingan	55	42	26	123
3.	Industri Pengolahan	371	26	30	427
4.	Listrik, Gas dan air Bersih	-	-	-	18
5.	Bangunan	85	-	-	85
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	3.190	1.021	121	4.332
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	212	39	21	272
8.	Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan	33	22	16	71
9.	Jasa-jasa swasta	48	26	21	95
	Jumlah	5.615	1.216	259	7.108

Sumber: Badan Pusat statistik kabupaten Bulukumba

Dari data tabel 1 menunjukkan bahwa, sektor usaha mikro masih paling banyak diminati oleh masyarakat kabupaten Bulukumba sebagai sumber mata pecaharian, dengan jumlah 5.615 jenis usaha, dengan sektor usaha perdagangan, hotel dan restoran yang paling banyak di jadikan sumber mata pencaharian, dengan jumlah 3.190 jenis usaha, dan yang paling sedikit dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah sektor usaha menengah, dengan jumlah jenis usaha 259 jenis usaha, mungkin faktor modal, pajak, izin usaha merupakan faktor penghambat, sehingga sektor ini masih kurang diminati oleh masyarakat kabupaten Bulukumba.

Adapun kriteria jenis usaha dan jumlah tenaga kerja, yang dikelompokkan dan merupakan suatu tolok ukur Badan Pusat Statistik dalam menilai usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Tolok Ukur Badan Pusat Statistik dalam menilai UMKM

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga kerja	4> orang	5-19 orang	20-99 orang	100> orang

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat jika jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk usaha mikro kurang lebih 4 orang, usaha kecil 5-19 orang dan paling banyak dibutuhkan tenaga kerja adalah usaha besar sebanyak 100 orang lebih.

Setiap daerah mempunyai sentra unggulan, baik sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, industri, maupun sektor-sektor lain, dimana kabupaten Bulukumba mempunyai keunggulan lewat sektor perdagangan dan industri rumah tangga jagung marning, dimana dapat dilihat pada data dibawah ini, sektor unggulan kabupaten Bulukumba pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Sektor-sektor Unggulan Kabupaten Bulukumba dan Jenis Usahanya

No.	Sektor Unggulan	Jenis Usaha		
		Usaha mikro	Usaha kecil	Usaha menengah
1.	Jagung Marning	Ya	-	-
2.	Pembuatan Kapal	-	-	Ya
3.	Perkebunan Cengkeh	-	Ya	-
4.	Barang campuran	Ya	-	-
5.	Pariwisata bira	-	Ya	-
6.	Perkebunan karet	-	-	Ya
7.	Pertanian	-	Ya	-

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Berdasarkan data Tabel 3 dapat dilihat, sektor- sektor unggulan pemerintah kabupaten Bulukumba dalam bidang UMKM, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah atau biasa disebut PAD, dimana sektor unggulan tersebut sudah menjadi daya tarik masyarakat bulukumba, untuk memulai usaha pada bidang dan jenis usaha unggulan tersebut.

Menurut Soeharto (2004) pemberdayaan adalah suatu proses yang menciptakan seseorang kelompok, atau masyarakat, memiliki kekuatan dan kemandirian. Sedangkan menurut Khusaini (2013) pemberdayaan adalah upaya membangun daya saing, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan aksi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan, antara lain mikro, mezzo, dan makro (Ningrum et al., 2018): 1. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. 2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. 3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai startegi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbyng, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disingkat dengan (UMKM). Meskipun tidak ditemukan pengertian yang baku menegenainya dalam kamus dan ensiklopedia bahasa Indonesia, praktisnya UMKM sering dihubungkan dengan modal terbatas, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah usaha (Nur, 2017). Umumnya jenis usaha ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat menengah ke bawah. Walaupun demikian, jenis usaha ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Kehadirannya telah membuka mata masyarakat banyak, khususnya mereka yang ingin bergelut dalam dunia bisnis. Karena itu tidak mengherankan kalau ditemukan fakta tidak sedikit pengusaha yang memulai usaha mereka dengan jenis usaha ini kemudian berkembang menjadi pengusaha yang sukses.

Industri kecil dan rumah tangga mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dari segi unit usaha dan penyerapan tenaga kerjanya. Industri Kecil dan Rumah Tangga mampu bertahan saat terjadi krisis yang melanda Indonesia, jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserap lebih besar dibandingkan dengan industri dengan skala besar maupun sedang. Maka pemerintah harus mendukung peran Industri Kecil dan Rumah Tangga sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Sebaiknya pemerintah harus turut berperan aktif dalam memberdayakan Industri Kecil dan rumah Tangga diantaranya memberikan kebijakan yang berpihak kepada Industri Kecil dan Rumah Tangga (Suprayitno, 2018). Penyerapan akan tenaga kerja di Industri kecil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah unit usaha, besarnya output, upah minimum, dan faktor lainnya (Annisa, 2021; Tiarawati, 2017).

Berdasarkan masalah pokok dan kerangka pemikiran yang telah di uraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1:** Faktor Pendorong dan Penghambat UMKM di kabupaten Bulukumba mempunyai pengaruh dalam pemberdayaan UMKM di kabupaten Bulukumba.
- H2:** Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bulukumba, mempunyai pengaruh terhadap, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- H3:** Peran Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi, mempunyai pengaruh terhadap faktor pendorong dan penghambat UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif. Penelitian eksploratif ini pada umumnya untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu pada suatu hal yang diteliti. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba yaitu sejumlah 7.931 jenis UMKM, berdasarkan data dari Dinas koperasi, umkm, perdagangan, pertambangan, dan energi kabupaten Bulukumba. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, literature, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian (Sugiyono, 2013). Data sekunder ini berbentuk data runtut waktu (time series). Data yang digunakan pada kurun waktu 2015 sampai 2020 dalam bentuk tahunan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulukumba, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literature dan data olahan. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksud untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan akurat dari penerbitan seperti koran, buku-buku, majalah dan internet. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan yaitu mereduksi data, menyajikan data (display data) lalu melakukan verifikasi (pengambilan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bulukumba

Upaya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bulukumba di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan faktor penunjang yang menjadi peluang serta kekuatan bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi untuk mencapai tujuan pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bulukumba.

- a. Dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba

Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap dunia usaha yang memiliki modal kecil, merupakan suatu hal yang patut dicontoh oleh Pemerintah Kabupaten lain sehingga dengan adanya dukungan tersebut maka pelaku UMKM tidak perlu merasa cemas terhadap nasib mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut.

Maka peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bulukumba sangatlah baik bagi pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba.

Adapun peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba ini hanyalah sia-sia belaka jika para pelaku UMKM tidak memanfaatkan peluang ini secara baik seperti yang dikutip Tambunan (2009:2) mengemukakan bahwa:

“Karena sangat padat karya berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin, hal ini juga yang menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di pedesaan.”

Dari pernyataan tersebut maka peran UMKM dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah atau wilayah khususnya pedesaan, yang dimana Pemerintah Kabupaten Bulukumba sendiri telah memberikan lampu hijau bagi para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba.

Selain sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat UMKM juga merupakan suatu program pengentasan kemiskinan yang mungkin pada saat ini bangsa Indonesia rata-rata jumlah kemiskinan di Indonesia sangatlah besar jika diukur dari potensi sumber daya alamnya yang cukup melimpah.

Maka disinilah peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu dengan menerbitkan berbagai program-program yang telah dibuat, melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi di Kabupaten Bulukumba. semoga dapat membantu masyarakat miskin yang ingin memperbaiki taraf hidupnya melalui dunia usaha.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor pendorong masyarakat Kabupaten Bulukumba memulai usahanya ialah faktor ekonomi yang mendesak, yang kemudian jadi penyemangat bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk memulai modal usahanya dengan bermodalkan pinjaman dari bank, dan koperasi dari modal pinjaman itulah para pelaku UMKM yang berada di kabupaten Bulukumba berkembang dan menunjukkan grafik peningkatan yang lumayan cukup bagus bagi Kabupaten yang baru saja berumur 58 tahun pada 4 februari bulan ini, kabupaten yang terbilang masih cukup muda dibandingkan dengan perkembangan UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba.

Setiap warga masyarakat pasti mendambakan yang namanya kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan karena bantuan dari pemerintah Pusat, baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun program Beras Miskin (raskin) yang hanya mensejahterahkan pada saat-saat tertentu saja, tapi kesejahteraan yang berupa keuntungan dari waktu ke waktu bahkan tiap hari sudah cukup untuk kebutuhan primer bahkan sekunder, untuk mensejahterahkan masyarakat kecil.

Masalah ekonomi juga merupakan masalah yang cukup lama dan sering terdengar di telinga kita, karena merupakan tolok ukur antara si kaya dan si miskin. Permasalahan ekonomi yang inilah yang dapat dijadikan pendorong, penyemangat, untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, dan pasti terjadi pada seluruh lapisan masyarakat jika di hadapkan pada permasalahan ekonomi.

c. Masih kurangnya para wirausahaan yang berkompeten

Masih kurangnya wirausahaan yang mempunyai keterampilan di atas rata-rata seperti yang terdapat di pulau jawa, menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai lahan yang sangat baik bagi para calon wirausahaan yang mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang yang digelutinya, karena masih kurangnya produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yaitu produk berkualitas tapi harga terjangkau.

Hal itu menjadi cambuk bagi para sarjana muda yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi mempunyai keterampilan tapi tidak dapat menyalurkannya sehingga menghasilkan suatu karya yang dapat dijual baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Perkembangan suatu badan usaha ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia dan sumber keuangan atau modal yang memadai, akan tetapi banyak sekali pengusaha yang inovatif dan sebenarnya mempunyai prospek untuk mengembangkan usahanya harus kandas ditengah jalan akibat tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain, dan lama kelamaan akan bangkrut dan merugi.

Kabupaten Bulukumba sendiri disamping sudah memberikan program-program dan pelatihan, akan tetapi pengusaha yang berada di Kabupaten Bulukumba masih kurang bisa, atau masih belum mampu untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lain.

Semoga dengan masih banyaknya para pelaku UMKM yang kurang berkompeten dapat memicu para calon pengusaha yang mempunyai inovasi, imajinasi, dan kalau bisa sebuah mimpi untuk menjadikan pelaku UMKM lebih sejahtera.

Faktor Penghambat

Perkembangan Usaha sebagian lainnya masih jalan di tempat dan bahkan ada yang bangkrut karena mampu bersaing dengan para pelaku UMKM yang terdapat di Kabupaten Bulukumba. namun UMKM merupakan salah satu pekerjaan yang banyak di jalani oleh sebagian orang di Indonesia, karena selain modal yang dibutuhkan tidak terlalu cukup besar penghasilan yang didapatkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Dan berikut ini adalah berbagai macam faktor penghambat pelaku UMKM untuk berkembang.

a. Modal

Keterbatasan akses permodalan keadaan itu menyulitkan bagi para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba, untuk meningkatkan kapasitas usaha yang mampu bersaing dengan produk-produk yang mempunyai kualitas yang lebih baik meskipun Pemerintah telah memberikan solusi dengan berbagai kebijakan skim

kredit mudah dan murah, namun hal itu masih sangat sulit terjangkau bagi para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba.

b. Sumber Daya Manusia

Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan faktor pendorong dan penghambat baik maju tidaknya suatu usaha, dan untuk itu salah satu faktor penghambat tidak bisa berkembangnya suatu usaha karena kurangnya sumber daya manusia yang baik, baik berupa keahlian, bakat, maupun yang ditempa dari pelatihan-pelatihan yang memakan banyak biaya tapi tidak menghasilkan output yang kurang bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang sudah lama berkiprah di dunia usaha.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai inovasi-inovasi maupun imajinasi yang berada di Kabupaten Bulukumba masih sangat kurang, karena berbagai macam persoalan yang mungkin jika dibiarkan akan terjadi pengangguran yang tidak stabil, oleh karena itu peran pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang menangani langsung tentang masalah UMKM ini.

c. Pemasaran

Sektor pemasaran merupakan suatu akhir dari sebuah produksi dari produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM, di Kabupaten Bulukumba sendiri, sektor pemasaran hanya pada lingkup Kabupaten Bulukumba, sangat sedikit yang produksi barangnya dikirim ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar, karena pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba masih belum bisa bersaing dengan pelaku UMKM yang berada di kota Makassar. Di kota Makassar saja masih belum mampu apa lagi di luar Sulawesi khususnya di pulau Jawa yang sektor UMKM sudah bisa bersaing dengan pasar internasional misalnya cibaduyut yang berda di Provinsi Jawa Barat.

Letak Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang masih terbilang sangat jauh sekitar kurang lebih 150 KM, jika di pulau Jawa jarak 150 KM tidak terlalu jauh karena faktor sarana dan prasarana yang mendukung.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bulukumba oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bulukumba

Krisis ekonomi yang melanda Asia saat ini menimbulkan debat dan perenungan yang mendalam terhadap karakter mendasar dari krisis ini, seberapa jauh tindakan-tindakan dan perubahan dan perbaikan telah membawa hasil serta langkah-langkah untuk mencegah berulangnya krisis, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Sutedi dalam Ibrahim (2016) bahwa " Pada saat tanda-tanda ekonomi Asia mulai pulih kembali masalah pengelolaan perusahaan (corporate governance) tetap menjadi perhatian utama" dari kutipan tersebut diatas semakin mempertegas pentingnya UMKM di Indonesia, karena pada saat krisis tersebut sektor usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terpengaruh akan dampak krisis yang terjadi pada saat terjadinya krisis tersebut.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bulukumba mulai memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bulukumba dengan

berbagai upaya yang dilakukan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Pertambangan, Perindustrian dan Energi di Kabupaten Bulukumba.

Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bulukumba

Sebagai sebuah instansi sektor publik, pemerintah Kabupaten khususnya Dinas, Koperasi dan UMKM, Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba mempunyai perencanaan yang berorientasi pada apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2015 - 2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Perencanaan Dinas, Koperasi dan UMKM, Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba mencakup Visi, Misi, Tujuan, sasaran serta cara pencapaian sasaran yang ingin dicapai.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), Peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (treats).

Sektor unggulan umkm di Kabupaten Bulukumba adalah sentra jagung marning, dimana sangat marak di kabupaten Bulukumba, jika dilihat dari data dibawah ini, dapat dilihat sektor umkm yang berada disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Bulukumba, pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Data Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan di Bulukumba	UMKM (unit)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Tenaga Kerja (orang)
1	2	3	4	5
1	Gantarang	1.980	88.912	3.912
2	Kindang	123	612	458
3	Ujung Bulu	3.478	170.980	6.090
4.	Kajang	54	174	88
5	Rilau Ale	85	341	273
6	Ujung Loe	890	809	479
7	Bulukumpa	1090	879	506
8	Bonto Bahari	98	321	249
9.	Bonto Tiro	78	301	214
10	Herlang	65	219	90
	Jumlah	7.931	264.029	12.807

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi

Berdasarkan data tabel 4 dapat dilihat jika kecamatan yang paling banyak jumlah unit usahanya adalah kecamatan ujung bulu, dimana kecamatan ini termasuk kecamatan kota kabupaten Bulukumba. yang jumlah unit usahanya sebanyak 3.013 unit usaha, dengan total produksi sebanyak 170.980 produksi dan membutuhkan pekerja sebanyak 6.090 tenaga kerja, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah unit usahanya adalah kecamatan kajang, dan merupakan daerah terluar dari kabupaten Bulukumba, mempunyai jumlah unit usaha sebanyak 18 unit usaha,

dengan total produksi sebanyak 174 produksi, dan membutuhkan 88 tenaga kerja, jadi total keseluruhan jumlah unit usaha di kabupaten Bulukumba sebanyak 5.080 jumlah unit usaha, dengan total produksi sebanyak 264.029 jumlah produksi, dan mempunyai tenaga kerja sebanyak 12.807 tenaga kerja, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sarana stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Pertambangan dan Energi di bawah ini:

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
2. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
5. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
6. Program Pernciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
10. Program Pembinaan Pedagangan kaki Lima dan Asongan
11. Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan
12. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
13. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
14. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Akan tetapi program yang telah di terapkan sudah berjalan dengan baik, tapi belum maksimal, oleh karena itu Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi mempunyai tugas yang cukup berat karena bukan hanya UMKM yang ditanganinya melainkan ada beberapa Dinas didalamnya, jika di daerah yang sudah maju Dinas-Dinas tersebut sudah di pangkas jadi beberapa dinas, akan tetapi Kabupaten Bulukumba daerah yang masih berkembang yang mempunyai beberapa Dinas tapi dibawah satu naungan.

Pencapaian Kinerja Dinas, Koperasi dan UMKM, Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari 34 (Tiga puluh Empat) kegiatan, dari 18 (Delapan belas) program.

Secara umum Dinas, Koperasi dan UMKM, Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. dari 34 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, semua telah mencapai kinerja yang diharapkan, namun tingkat keberhasilan belum diwujudkan secara optimal.

Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran, jika indikator keberhasilan dari Input dapat diwujudkan lebih dari 98,57 (%) idealnya, capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat manfaat dan dampak. Namun demikian, ukuran pada tingkat ini masih belum dapat dilakukan, hal ini

disebabkan antara lain: 1. Pada indikator manfaat dan dampak belum dapat diwujudkan pada tahun 2020. 2. Indikator manfaat dan dampak mungkin saja telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran, sehingga ukuran/capaian keberhasilannya belum dapat dilakukan.

Dengan alasan tersebut, maka sebagian besar capaian sasaran ini baru dapat dilakukan pada tingkat hasil (outcome) saja. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut dalam bentuk table 5.

Tabel 5. Indikator Sasaran Kelompok Masyarakat dan UMKM

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya Iklim Usaha yang Kondusif	Unit	5	5	100
2.	Terciptanya Koperasi yang Berperestasi	Koperasi	10	10	100
3.	Terwujudnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Bulan	12	12	100
4.	Terlaksananya Rehabilitasi Pasar	Unit	5	5	100

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Menurut data table 5, indikator sasaran kelompok masyarakat dan UMKM terciptanya iklim yang kondusif pada tatanan UMKM di Kabupaten Bulukumba dengan indikator kinerja 100%.

Tabel 6. Sasaran Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Dan Permodalan Bagi UMKM

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Testisnya Administrasi Usaha	Kop/Org	25	25	100
2.	Meningkatnya Pemantauan Koordinasi terhadap Pendukung Usaha bagi UMKM	Persen	100	100	100
3.	Meningkatnya Stabilitas Harga	Persen	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi,

Table 6 menunjukkan bahwa sasaran peningkatan kerjasama bagi semua pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta, mencapai 100%.

Tabel 7. Sasaran Peningkatan Kerjasama Bagi Semua Pelaku Usaha Baik Swasta
Maupun Pemerintah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan asongan	Unit	5	5	100
2.	Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Kemitraan	Unit	228	228	100
3.	Terlaksananya sarana informasi bagi masyarakat	Kali	3	2	66,67
4.	Meningkatkan pemantauan dan koordinasi terhadap pendukung usaha bagi UMKM	Kecamatan	10	10	100

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa semua program yang telah di jalankan terlaksana, akan tetapi sarana informasi bagi masyarakat belum tercapai karena hanya mencapai 66,67%.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan UMKM ini masih terdapat faktor pendukung dan penghambat dan peran dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan energi yaitu:

1. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bulukumba:
 - a) Dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba: Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba terhadap dunia usaha yang memiliki modal kecil, merupakan suatu hal yang patut dicontoh oleh Pemerintah Kabupaten lain sehingga dengan adanya dukungan tersebut maka pelaku UMKM tidak perlu merasa cemas terhadap nasib mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut. Maka disinilah peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu dengan menerbitkan berbagai program-program yang telah dibuat, melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi di Kabupaten Bulukumba. semoga dapat membantu masyarakat miskin yang ingin memperbaiki taraf hidupnya melalui dunia usaha.
 - b) Faktor Ekonomi: Masalah ekonomi juga merupakan masalah yang cukup lama dan sering terdengar di telinga kita, karena merupakan tolok ukur antara si kaya dan si miskin. Permasalahan ekonomi yang inilah yang dapat dijadikan pendorong, penyemangat, untuk mencapai suatu tujuan bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, dan pasti terjadi pada seluruh lapisan masyarakat jika di hadapkan pada permasalahan ekonomi.
 - c) Masih kurangnya para wirausahaan yang berkompeten: Masih kurangnya wirausahaan yang mempunyai keterampilan di atas rata-rata seperti yang terdapat di pulau jawa, menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai lahan yang sangat baik bagi para calon wirausahaan yang mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang yang digelutinya, karena masih kurangnya produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yaitu produk berkualitas tapi harga terjangkau.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM antara lain:
 - a) Modal: Keterbatasan akses permodalan keadaan itu menyulitkan bagi para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bulukumba, untuk meningkatkan kapasitas usaha.
 - b) Sumber Daya Manusia: Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan faktor pendorong dan penghambat baik maju tidaknya suatu usaha, dan untuk itu salah satu faktor penghambat tidak bisa berkembangnya suatu usaha karena kurangnya sumber daya manusia yang baik, baik berupa keahlian, bakat, maupun yang ditempa dari pelatihan-pelatihan yang memakan banyak biaya tapi tidak menghasilkan output

yang kurang bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang sudah lama berkiprah di dunia usaha.

- c) Pemasaran: Sektor pemasaran merupakan suatu akhir dari sebuah produksi dari produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM, di Kabupaten Bulukumba sendiri, sektor pemasaran hanya pada lingkup Kabupaten Bulukumba, sangat sedikit yang produksi barangnya dikirim ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kota Makassar, karena pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba masih belum bisa bersaing dengan pelaku UMKM yang berada di kota Makassar.
3. Upaya-upaya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi dalam pemberdayaan UMKM meliputi pemberdayaan UMKM baik program-program yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi maupun berbagai pelatihan yang telah di jalankan oleh para calon pelaku UMKM, maupun yang telah lama menggeluti dunia usaha tersebut. dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini para pelaku UMKM tersebut sudah mendapatkan berbagai macam program. Upaya Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi dalam Pemberdayaan UMKM sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih belum optimal dilakukan karena masih banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi itu sendiri.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi, perlu menambah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM baik untuk Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Dan Energi, maupun untuk para Pelaku UMKM sehingga mempermudah bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi untuk lebih memperhatikan para pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba.
2. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Dan Energi perlu bekerja sama dengan instansi lain misalnya perbankan sehingga bisa mendapatkan modal secara mudah bagi pelaku UMKM, yang masih sangat sulit di jangkau, yang dapat mendorong dan meningkatkan UMKM di kabupaten Bulukumba, sehingga dapat menambah dana dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM serta mengajukan proposal untuk menambah jumlah anggaran di tahun berikutnya.
3. Banyaknya faktor penghambat Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi perlu meningkatkan sosialisasi tentang program pemberdayaan UMKM yang disertai dengan pemberian bantuan langsung dalam setiap kegiatan sehingga para Pelaku UMKM tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap produktif dalam

memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk memulai berinovasi dan berimajinasi agar mampu mengangkat nama baik Kabupaten Bulukumba, Khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Referensi:

- Abidin, A. (2018). Pengembangan usaha micro kecil dan menengah (UMKM) sebagai kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 5(4). <http://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/263>
- Annisa, M. (2021). Peran dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi covid-19 di Kota Binjai. Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45516>
- Darwanto, D. (2017). Membangun daya saing UKM dalam perekonomian nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 2(1). <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/13>
- Firmansyah, R. (2014). Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Madiun (studi pada dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan pariwisata dan sentra industri brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). Brawijaya University. <https://www.neliti.com/publications/77266/strategi-pemerintah-daerah-dalam-pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di>
- Ibrahim, M. (2016). Peran dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Samarinda (studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda*, 4(1), 256–267. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/JURNAL>
- Khusaini, M. (2013). *Ekonomi mikro: dasar-dasar teori*. Universitas Brawijaya Press.
- Kuncoro, M. (2007). Usaha kecil di Indonesia: Profil, masalah dan strategi pemberdayaan. *Sumber*, 7(1), 6–8. https://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811998215/files/struktur_ekonomi_umkm.pdf
- Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T. (2018). Peran dinas koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM di kota Surabaya. *Sumber*, 29, 26–800. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/36.pdf>
- Nur, D. S. (2017). Peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 5844. <http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/JURNAL>
- Pratama, D. (2016). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tenun ikat bandar kidul sebagai salah satu ikon di kota Kediri (studi kampung UMKM Tenun Ikat Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri). Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/118508/>
- Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM batik di kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 47–52. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.23452>
- Soeharto, E. (2004). Metodologi pengembangan masyarakat: *Jurnal comev*. BEMJ-PMI.

- Jakarta, 1.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Suprayitno, D. K. (2018). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/74627/>
- Syafii, A., Hastin, M., Salmiah, S., Rahmadana, M. F., Nainggolan, L. E., Simatupang, S., Rozaini, N., Azwar, K., & Nurofik, A. (2020). Ekonomi Mikro. Yayasan Kita Menulis.
- Tiarawati, E. (2017). Peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pemberdayaan usaha kripik pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung (Kajian Etika Bisnis Islam). <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6369/>
- Wardani, H. K. (2013). Peranan dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah kota Malang (studi pada dinas koperasi dan UKM kota Malang). Brawijaya University. <https://www.neliti.com/publications/73131/peranan-dinas-koperasi-dan-ukm-dalam-pemberdayaan-usaha-kecil-menengah-kota-mala>